

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Author:

Tasya Rahmadani¹
Ruswan Nurmadi²
Muhammad Arief³

Afiliation:

Universitas Harapan Medan^{1,2,3}

Corresponding email

rahmadanitasya29@gmail.com¹



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstract :

The purpose of this research was to assess the financial performance of the Medan City Government by analyzing budget performance for the 2018-2023 fiscal year. The object of this research is the Regional Finance and Asset Agency of Medan City. The analysis method used is descriptive quantitative which is done by making a description of the problems that have been identified. The results of this research indicate that the analysis of revenue variance has a negative difference, revenue growth experiences fluctuating growth with the degree of decentralization is considered good, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue shows less effective. The expenditure variance analysis can be categorized as good, the compatibility of operating expenditure is considered very harmonious, the compatibility of capital expenditure is considered not harmonious, and the effectiveness ratio of regional expenditure is said to be efficient. So it can be said that the condition of the financial capacity of Medan City is still not ideal with fluctuating growth and less effective. In addition, the performance of expenditure can be said that the Medan City Government is considered less harmonious and has made efficiency in the use of the budget.

Keywords : Revenue Budget of Performance, Expenditure Budget Performance, Budget Realization Report, Regional Financial Performance

Pendahuluan

Keberhasilan suatu entitas khususnya pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja keuangan yang telah dicapainya. (Kemala et al., 2023), menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Sementara, bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(Labi, 2019), menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat dipakai untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Untuk meraih keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya untuk mengelola keuangan. Anggaran yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah selanjutnya akan dibuat laporan pertanggungjawaban setiap periode

untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan daerah, laporan ini mempertunjukkan yang berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga menggambarkan apakah pemerintah sudah menggunakan anggarannya dengan baik atau tidak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 macam yang salah satunya adalah laporan realisasi anggaran.

Menurut (Amanda et al., 2021), menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan keuangan entitas yang memberikan informasi mengenai anggaran penerimaan berupa pendapatan dan pengeluaran berupa belanja yang ditetapkan lalu dibandingkan dengan realisasinya. Dalam laporan tersebut dijelaskan tentang apakah sumber daya ekonomi yang didapatkan oleh suatu daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, jika:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan

TAHUN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	(%)
2018	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53	(985.789.252.583,47)	81%
2019	6.257.239.035.331,00	5.518.772.179.306,31	(738.466.856.024,69)	88%
2020	4.757.852.448.866,16	3.988.761.485.152,01	(769.090.963.714,15)	84%
2021	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	(185.883.828.510,71)	96%
2022	6.522.123.770.774,00	5.617.379.246.746,50	(904.744.524.027,50)	86%
2023	7.296.157.352.009,00	5.802.580.478.749,50	(1.493.576.873.259,50)	80%

Sumber: LRA BKAD, 2018-2023

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui pendapatan Kota Medan dari tahun 2018-2023 selama kurun waktu 6 (enam) tahun cenderung mengalami fluktuatif artinya mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan Kota Medan sebesar 81% dengan total realisasi Rp 4.253.618.758.532,53. Di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 88% dengan total nilai realisasi sebesar Rp 5.518.772.179.306,31. Di tahun berikutnya tahun 2020 mengalami penurunan realisasi yang sangat besar dari tahun sebelumnya menjadi 84% dengan total realisasi sebesar Rp 3.988.761.485.152,01. Pada 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 96% dengan total nilai realisasi sebesar Rp 5.023.080.346.608,29. Kemudian di tahun 2022 kembali mengalami penurunan persentase menjadi 86%. Terakhir pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali persentase menjadi 80% dengan realisasi sebesar Rp. 5.802.580.478.749,50. Dengan cenderung mengalami fluktuatif dan 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan tingkat persentase pendapatan daerah tersebut dengan kata lain pemerintah daerah Kota Medan belum mampu mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan harusnya diperoleh pemerintah daerah. (Mustafa & Anugranita, 2016) menyatakan bahwa suatu kinerja keuangan dapat dikatakan baik dalam hal ini kinerja pendapatan daerah apabila mampu mencapai pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan. Untuk itu pemerintah Kota Medan perlu melakukan evaluasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pada Tabel 1 juga menunjukkan nilai pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 20% sedangkan pertumbuhan pendapatan di tahun 2021 sebesar 17% dan pertumbuhan pendapatan di tahun 2020 sangat menurun diperoleh pendapatan sebesar -24%. (Ambya, 2023), menjelaskan bahwa tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan daerah tersebut positif dan kecenderungannya meningkat atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan. Untuk itu perlu adanya

tinjauan lebih lanjut apakah nanti jika dianalisis menghasilkan kinerja yang bertumbuh secara positif atau negatif.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH LEBIH (KURANG)	(%)
2018	5.449.562.922.528,00	4.213.480.509.726,24	(1.236.082.412.801,76)	77%
2019	6.302.963.592.428,05	5.059.387.661.308,01	(1.243.575.931.120,04)	80%
2020	5.254.667.074.399,53	3.854.742.410.736,56	(1.399.924.663.662,97)	73%
2021	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87	(1.232.249.917.963,13)	79%
2022	7.668.720.191.488,00	6.087.701.746.919,07	(1.581.018.444.568,93)	79%
2023	7.844.702.182.572,00	6.282.441.543.317,28	(1.562.260.639.255,72)	80%

Sumber: LRA BKAD, 2018-2023

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja pada Kota Medan. Pada tahun 2018 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp 5.449.562.922.528,00 dengan terealisasi sebesar Rp 4.213.480.509.726,24 terdapat selisih kurang sebesar Rp 1.236.082.412.801,76 dengan persentase 77%.

Pada tahun 2019 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp 6.302.963.592.428,05 dengan terealisasi sebesar Rp 5.059.387.661.308,01 terdapat selisih kurang sebesar Rp 1.243.575.931.120,04 dengan persentase 80%. Kemudian Pada tahun 2020 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp 5.254.667.074.399,53 dengan terealisasi sebesar Rp 3.854.742.410.736,56 terdapat selisih kurang sebesar Rp 1.399.924.663.662,97 dengan persentase 73%.

Pada tahun 2021 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp 5.731.395.062.275,00 dengan terealisasi sebesar Rp 4.499.145.144.311,87 terdapat selisih kurang sebesar Rp 1.232.249.917.963,13 dengan persentase 79%. Kemudian Pada tahun 2022 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp 7.668.720.191.488,00 dengan terealisasi sebesar Rp 6.087.701.746.919,07 terdapat selisih kurang sebesar Rp 1.581.018.444.568,93 dengan persentase 73%.

Terakhir pada tahun 2023 anggaran belanja pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp. 7.844.702.182.572,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.282.441.543.317,28 dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah Kota Medan yang ditetapkan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan dapat dilihat secara menyeluruh bahwa realisasi yang dicapai lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari data tersebut nanti dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Di samping itu untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kota Medan ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di mana alokasi dana selama ini cenderung lebih besar kepada anggaran rutin dibanding anggaran pembangunan, hal ini membuat roda pembangunan tidak dapat dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat, selain itu bagaimana penyebaran anggaran belanja pembangunan itu sehingga dapat dilihat sektor-sektor mana yang sangat membebani anggaran daerah. Untuk itu sangat diperlukan evaluasi penggunaan anggaran belanja pembangunan selama ini agar dapat merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan ke depan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kota Medan ini dan diharapkan dengan adanya penggunaan belanja pembangunan yang tepat sasaran sehingga akan mempengaruhi pengembangan wilayah Kota Medan menuju Kota Metropolitan. Sehingga dapat dilihat distribusi APBD terhadap pembangunan Kota Medan, sektor-sektor yang mendapat prioritas pembangunan yang berasal dari APBD, dan dampak peranan distribusi APBD dalam pengembangan wilayah Kota Medan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan menganalisis APBD dalam laporan realisasi anggaran, penelitian pertama dilakukan oleh (Siregar & Harahap, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Medan masih belum ideal. Dilihat dari hasil rata-rata pada rasio pertumbuhan posisi Kota Medan berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti

pemerintah Kota Medan harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam APBD. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung, dan Rasio Pertumbuhan PAD. Penelitian kedua dilakukan oleh (Sari & Baku, 2022) hasil penelitian menunjukkan penggunaan anggaran pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif dan Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Tani et al., 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada pola hubungan konsultatif, rasio pertumbuhan tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif sedangkan tahun 2019-2021 mengalami pertumbuhan negatif, rasio efektivitas sudah sangat efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien dan rasio aktivitas terlihat bahwa belanja masih didominasi oleh belanja operasi. Sedangkan analisis kewajiban pemerintah secara keseluruhan sudah baik karena pemerintah sudah mampu melunasi kewajibannya dengan menggunakan ekuitas, pajak, PAD dan total pendapatan.

Penelitian ini merupakan modifikasi (Anggi, 2022) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020” di mana penelitian ini masih menggunakan metode perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan analisis yang berbeda yaitu menambahkan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan serta subjek penelitian yang berbeda yaitu Laporan Realisasi Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat diketahui hasil kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

Adapun yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu, terletak pada analisis rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dan juga pemilihan subjek. Dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan adalah rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Alasan peneliti menambahkan analisis pertumbuhan pendapatan dikarenakan analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif, dan pemilihan subjek peneliti memfokuskan pada laporan realisasi anggaran Kota Medan tahun 2018-2023.

Analisis kinerja pendapatan dan kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan. Berdasarkan latar belakang di atas dengan banyak pertimbangan yang ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023”**.

Studi Literatur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana satu pihak mengilustrasikan perkiraan pengeluaran guna untuk membiayai suatu kegiatan maupun proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain mengilustrasikan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut (Silaen et al., 2021) Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menyelesaikan tanggungjawabnya. Kemudian tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas secara keseluruhan di periode tertentu disebut juga dengan kinerja. Begitu pun dengan penyelesaian tugas dan tanggung jawab oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dapat juga disebut dengan kinerja.

Pengertian pengukuran kinerja adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus memajukan pekerjaan ke arah tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menghasilkan jasa dan barang perusahaan (M. Hidayat, 2018). Pengukuran kinerja dalam perusahaan diharapkan dapat secara efektif menetapkan pelaku manusia sebagai pekerjaan yang unggul di bidangnya dan bersaing untuk memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan.

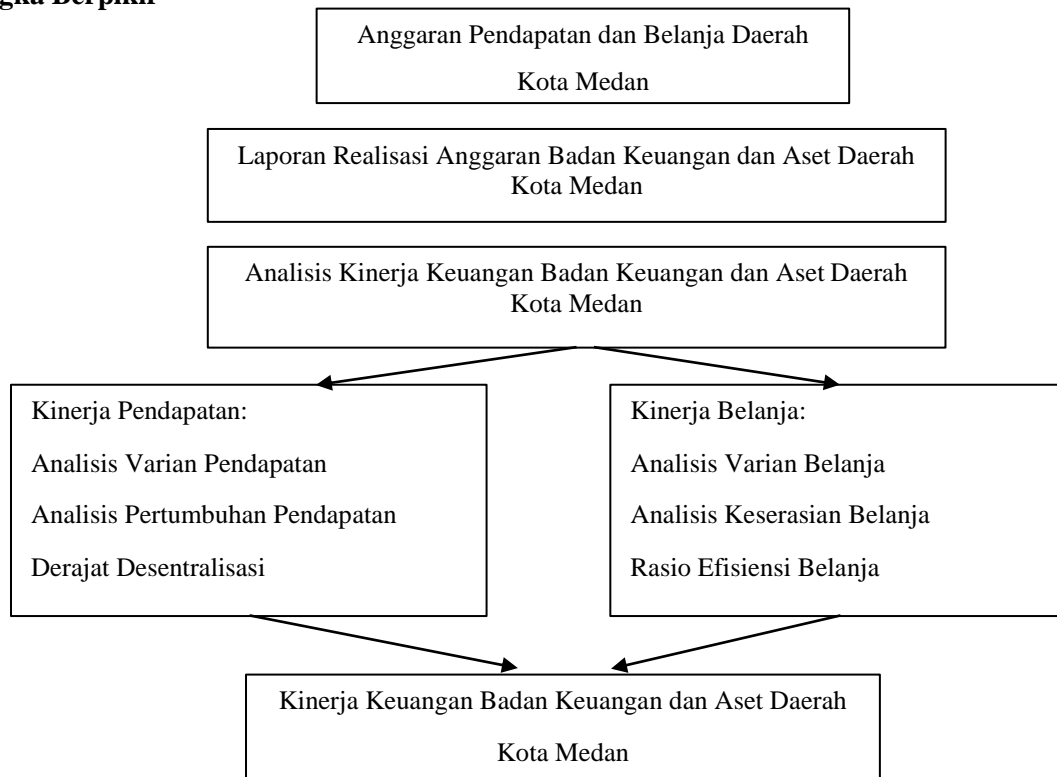
Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah yang diungkapkan oleh (Hantono, 2021), menyatakan bahwa akuntansi pemerintah ialah proses merekam, menaksir, dan mengenali seluruh transaksi ekonomi yang berlangsung pada pemerintah daerah. Hasil dari akuntansi pemerintah ialah laporan keuangan yang nantinya ditunjukkan ke pihak berkepentingan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dijadikan evaluasi karena memuat info mengenai realisasi penggunaan anggaran sehingga dengan menggunakan LRA seseorang dapat mengetahui tingkat pencapaian target suatu pemerintah daerah. Menurut (Yuliana et al., 2023) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode.

Kerangka Berpikir



Sumber: data diolah, 2025

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pada Gambar 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Salah satu laporan keuangan daerah yang dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah ialah laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dijadikan evaluasi karena memuat informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran sehingga dengan menggunakan LRA seseorang dapat mengetahui tingkat pencapaian target suatu pemerintah daerah.

Dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kemudian di analisis melalui beberapa metode-metode atas penilaian terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah, di mana setelah melewati metode tersebut maka penilaian atas kinerja keuangan daerah dapat dinilai dan disimpulkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan jika dianalisis dengan menggunakan Varians Pendapatan Belanja, Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Keserasian Belanja, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja. Populasi merupakan tahap penting dalam penelitian karena dapat memberikan informasi dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BKAD Kota Medan.

Hasil

Analisis Kinerja Pendapatan

Pemerintah daerah memerlukan lebih banyak otonomi keuangan dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal. Manajemen pendapatan dan analisis pendapatan menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Analisis kinerja pendapatan adalah proses evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi pendapatan, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan kinerja di masa depan (Ambya, 2023).

1. Analisis Varian Pendapatan

Analisis varian pendapatan melihat perbedaan antara pendapatan yang dicapai dan yang dianggarkan atau diharapkan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan komponen yang menyebabkan perbedaan ini, baik yang menguntungkan (positif) maupun yang tidak menguntungkan (negatif) (Ambya, 2023).

Tabel 3. Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018 - 2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	(%)
2018	5.239.408.011.116	4.253.618.758.532	(985.789.252.583)	81%
2019	6.257.239.035.331	5.518.772.179.306	(738.466.856.024)	88%
2020	4.757.852.448.866	3.988.761.485.152	(769.090.963.714)	84%
2021	5.208.964.175.119	5.023.080.346.608	(185.883.828.510)	96%
2022	6.522.123.770.774	5.617.379.246.746	(904.744.524.028)	86%
2023	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749	(1.493.576.873.260)	80%
Rata – Rata			(846.258.716.354)	86%

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa varian pendapatan daerah Kota Medan secara keseluruhan memiliki rata – rata 86% atau sebesar Rp. -846.258.716.354 yang mempunyai selisih negatif,

artinya kinerja pendapatan daerah belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Medan belum mampu memperoleh pendapatan dengan baik.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk menentukan apakah kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif selama tahun anggaran atau selama periode anggaran tertentu (Ambya, 2023). Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan:

Tabel 4. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan
2018	1.636.204.514.683		4.253.618.758.532	
2019	1.829.669.955.348	11,8%	5.518.772.179.306	29,7%
2020	1.509.831.081.747	-17,4%	3.988.761.485.152	-27,7%
2021	1.906.512.189.047	26,2%	5.023.080.346.608	25,9%
2022	2.186.261.231.905	14,6%	5.617.379.246.746	11,8%
2023	2.442.782.732.668	11,7%	5.802.580.478.749	3,2%

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 mengalami turun naik. Pertumbuhan PAD pada tahun 2019 sebesar 11,8% menurun pada tahun 2020 sebesar -17,4%. Pada tahun 2021 pertumbuhan PAD naik sebesar 26,2%, menurun pada tahun 2022 sebesar 14,6% dan turun lagi pada tahun 2023 sebesar 11,7%. Pertumbuhan TPD pada tahun 2019 sebesar 29,7% turun pada tahun 2020 sebesar -27,7%, pada tahun 2021 naik dengan nilai sebesar 25,9% namun kembali turun pada tahun 2022 sebesar 11,8% dan turun lagi sebesar 3,2% pada tahun 2023.

Tabel 5. Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kinerja
2018	1.636.204.514.683	4.253.618.758.532	38,4%	Baik
2019	1.829.669.955.348	5.518.772.179.306	33,1%	Baik
2020	1.509.831.081.747	3.988.761.485.152	37,8%	Baik
2021	1.906.512.189.047	5.023.080.346.608	37,9%	Baik
2022	2.186.261.231.905	5.617.379.246.746	38,9%	Baik
2023	2.442.782.732.668	5.802.580.478.749	42%	Baik
Rata-Rata			38%	Baik

Sumber: data diolah, 2025

Pada Tabel 5, perhitungan derajat desentralisasi daerah Kota Medan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 derajat desentralisasi mengalami naik dan turun. Pada tahun 2018 sebesar 38,4%, pada tahun 2019 sebesar 33,1%, pada tahun 2020 sebesar 37,8%, pada tahun 2021 sebesar 37,9%, pada tahun 2022 sebesar 38,9%, dan kembali naik sebesar 42% pada tahun 2023. Berdasarkan kriteria derajat desentralisasi, rasio yang dihasilkan adalah kurang dari 50% dengan kategori baik, maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Meski mengalami naik turun, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kota Medan memiliki rata-rata sebesar 38% yang artinya kemampuan daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan selama periode 2018 – 2023 terbilang baik.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan atau ditargetkan (Ambya, 2023). Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio	Kinerja
2018	2.112.663.059.116	1.636.204.514.683	77,4%	Kurang Efektif
2019	2.312.760.384.058	1.829.669.955.348	79,1%	Kurang Efektif
2020	1.813.909.461.511	1.509.831.081.747	83,2%	Kurang Efektif
2021	2.139.239.943.474	1.906.512.189.047	89,1%	Kurang Efektif
2022	3.050.594.560.414	2.186.261.231.905	71,6%	Tidak Efektif
2023	3.751.632.336.388	2.442.782.732.668	65,1%	Tidak Efektif
Rata-Rata			77,6%	Kurang Efektif

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas PAD Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 pada Tabel 6, maka dapat diketahui bahwa rasio pada tahun 2018 sebesar 77,4%, pada tahun 2019 sebesar 79,1%, pada tahun 2020 sebesar 83,2%, pada tahun 2021 sebesar 89,1%, pada tahun 2022 sebesar 71,6%, dan sebesar 65,1% pada tahun 2023 dengan rata – rata rasio efektivitas PAD sebesar 77,6% yang menandakan bahwa kemampuan daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, analisis ini harus menentukan seberapa efisien pemerintah daerah telah menggunakan anggaran mereka untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran (Ambya, 2023).

1. Analisis Varian Belanja

Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis Varians Belanja dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan (Ambya, 2023). Berikut hasil perhitungan analisis varian belanja daerah Kota Medan.

Tabel 7. Perhitungan Varian Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	(%)
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	(1.236.082.412.801)	77%
2019	6.302.963.592.428	5.059.387.661.308	(1.243.575.931.120)	80%
2020	5.254.667.074.399	3.854.742.410.736	(1.399.924.663.662)	73%
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311	(1.232.249.917.963)	79%
2022	7.668.720.191.488	6.087.701.746.919	(1.581.018.444.568)	79%
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	(1.562.260.639.258)	80%
Rata – Rata			(1.375.852.001.563)	78%

Sumber: data diolah, 2025

Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik apabila realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa perhitungan varian belanja daerah Kota Medan pada tahun 2018 sebesar 77%, pada tahun 2019 sebesar 80%, pada tahun 2020 sebesar 73%, pada tahun 2021 2022 sebesar 79% dari jumlah yang dianggarkan, dan 78% pada tahun 2023.

2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui kesenambungan antar belanja, serta bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dana. Terdapat dua analisis pada keserasian belanja, yaitu belanja operasi terhadap total belanja dan belanja modal terhadap total belanja. Berikut ini disajikan hasil analisis keserasian belanja.

Tabel 8. Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio	Keserasian
2018	4.213.480.509.726	3.455.113.095.305	82%	Sangat Serasi
2019	5.059.387.661.308	4.066.127.201.868	80,3%	Sangat Serasi
2020	2.076.255.354.959	3.546.464.132.678	92%	Sangat Serasi
2021	4.499.145.144.311	3.833.501.098.374	85,2%	Sangat Serasi
2022	6.087.701.746.919	4.475.004.502.958	73,5%	Serasi
2023	6.282.441.543.317	4.788.957.849.977	76,2%	Serasi
Rata-Rata			81,5%	Sangat Serasi

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat rasio belanja operasi dari total belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 82%, pada tahun 2019 sebesar 80,3%, pada tahun 2020 sebesar 92%, pada tahun 2021 sebesar 85,2%, pada tahun 2022 sebesar 73,5%, dan 76,2% pada tahun 2023. Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata sebesar 81,5% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Hasil 81,5% dapat dikategorikan sangat serasi.

Tabel 9. Perhitungan Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio	Keserasian
2018	4.213.480.509.726	753.996.886.210	17,8%	Tidak Serasi
2019	5.059.387.661.308	992.661.245.694	19,6%	Tidak Serasi
2020	2.076.255.354.959	308.278.278.057	8%	Tidak Serasi
2021	4.499.145.144.311	574.604.617.139	12,7%	Tidak Serasi
2022	6.087.701.746.919	1.594.478.820.601	26,1%	Kurang Serasi
2023	6.282.441.543.317	2.378.363.903.973	37,8%	Kurang Serasi
Rata-Rata			20,3%	Kurang Serasi

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa keseluruhan rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Medan pada tahun 2018-2023 memiliki rata-rata sebesar 20,3%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi, pemerintah daerah menggunakan 20,3% dari total belanja daerah untuk belanja modal, yang meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja

gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi nya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan (Ambya, 2023).

Tabel 10. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio	Keserasian
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	77,3%	Efisiensi
2019	6.302.963.592.428	5.059.387.661.308	80,2%	Efisiensi
2020	5.254.667.074.399	3.854.742.410.736	73,3%	Efisiensi
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311	78,5%	Efisiensi
2022	7.668.720.191.488	6.087.701.746.919	79,3%	Efisiensi
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	80%	Efisiensi
Rata-Rata			78,1%	Efisiensi

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10 tingkat efisiensi belanja daerah Kota Medan tahun 2018 menggunakan 77,3% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2019 sebesar 80,2% dari total anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah, menurun pada tahun 2020 sebesar 73,3%. Pada tahun 2021 naik sebesar 78,5%, kembali naik sebesar 79,3% pada tahun 2022, dan naik sebesar 80% pada tahun 2023. Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisiensi, hal ini berarti kinerja pemerintah Kota Medan pada tahun 2018-2023 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

Pembahasan

Berikut ini diuraikan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2018 – 2023.

Analisis Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil perhitungan varian pendapatan menunjukkan bahwa tahun 2018 memiliki selisih sebesar Rp. 985.789.252.583 atau 81%, pada tahun 2019 memiliki selisih sebesar Rp. 738.466.856.024 atau 88%, pada tahun 2020 memiliki selisih sebesar Rp. 769.090.963.714 atau 84%, pada tahun 2021 memiliki selisih sebesar Rp. 185.883.828.510 atau 96%, pada tahun 2022 memiliki selisih sebesar Rp. 904.744.524.028 atau 86%, pada tahun 2023 memiliki selisih sebesar Rp. 1.493.576.873.260 atau 80% dengan rata – rata selisih sebesar Rp. 846.258.716.354 atau 86% dengan selisih yang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kota Medan belum baik. Selain itu, dilihat dari tahun 2018 hingga 2023 realisasi pendapatan belum dapat dicapai oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Medan belum mampu memenuhi target pendapatan dikarenakan terdapat pertumbuhan yang negatif. Dalam penyusunan pendapatan daerah, digunakan pos-pos yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar 11,8% dengan pertumbuhan Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 29,7%, pada tahun 2020 pertumbuhan PAD sebesar -17,4% dengan pertumbuhan TPD sebesar -

27,7%, pada tahun 2021 pertumbuhan PAD sebesar 26,2% dengan pertumbuhan TPD sebesar 25,9%, pada tahun 2022 pertumbuhan PAD sebesar 14,6% dengan pertumbuhan TPD sebesar 11,8%, dan pada tahun 2023 pertumbuhan PAD sebesar 11,7% dengan pertumbuhan TPD sebesar 3,2%. Peningkatan pendapatan sepanjang tahun 2018 – 2023 mengalami fluktuatif. Selain itu meskipun dari segi persentase tingkat pertumbuhan TPD mengalami fluktuatif, Pemerintah Kota Medan dalam hal ini dapat dikatakan memiliki kinerja positif, karena peningkatan yang tinggi pada tahun anggaran 2022 dan 2023.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi daerah Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 rata – rata derajat desentralisasi yang diperoleh sebesar 38%. Meskipun mengalami naik dan turun, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kota Medan dikatakan baik. Artinya kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan sebagainya terbilang baik.

Kemudian pada hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan diketahui memiliki rasio sebesar 77,4% pada tahun 2018, meningkat sebesar 79,1% pada tahun 2019, kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 83,2% dan 89,1% pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 71,6% dan kembali turun sebesar 65,1% pada tahun 2023. Nilai rata-rata yang diperoleh dari rasio efektivitas PAD sebesar 77,6% kurang dari 100% yang berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam mencapai PAD yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk terus membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan sektor usaha. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekowisata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Harahap, 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Medan masih belum ideal. Dilihat dari hasil rata-rata pada rasio pertumbuhan posisi Kota Medan berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti pemerintah Kota Medan harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Analisis Kinerja Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varian belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023, Pemerintah menggunakan menggunakan 77% dari jumlah yang dianggarkan pada tahun 2018, sebesar 80% pada tahun 2019, 73% pada tahun 2020, kemudian sebesar 79% pada tahun 2021 dan 2022 serta sebesar 80% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, Kota Medan selama 6 tahun memiliki rata – rata sebesar 78%, artinya kinerja Pemerintah Kota Medan dinilai baik. Dimana sepanjang tahun 2018 – 2023 Pemerintah Kota Medan menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Kinerja belanja Pemerintah Kota Medan akan dinilai baik apabila realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja Pemerintah Kota Medan mengalami fluktuatif. Meskipun begitu jumlah anggaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja yang baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 82%, sebesar 80,3% pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkatkan sebesar 92%, kembali menurun pada tahun 2021 sebesar 85,2%, 73,5% pada tahun 2022, dan 76,2% pada tahun 2023 digunakan untuk belanja operasi dari total belanja daerah. Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata – rata sebesar 81,5% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Berdasarkan hasil perhitungan belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 memiliki rata – rata sebesar 20,3% yang artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi. Pemerintah Kota Medan menggunakan 20,3% dari total belanja daerah untuk belanja modal yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih memprioritaskan belanja operasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 menggunakan 77,7% dari total anggaran belanja yang ditetapkan untuk belanja daerah. Pada tahun 2018 sebesar 77,3% meningkat pada tahun 2019 sebesar 80,2%. Kembali menurun pada tahun 2020 sebesar 73,3% kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 78,5%, 79,3% pada tahun 2022, dan sebesar 80% pada tahun 2023. Dari keseluruhan rata – rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini berarti kinerja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2018 – 2023 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Assidi, 2016) dengan hasil penelitian menunjukkan rasio varian belanja daerah rata – rata berada di bawah 100%, Keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk operasi sebesar 90,33% dibandingkan dengan belanja modal dengan rata – rata 9,57%, serta efisiensi belanja daerah menunjukkan rata – rata di bawah 100%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah Kota Medan:

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis varian pendapatan daerah tahun anggaran 2018 – 2023 Kota Medan secara keseluruhan memiliki rata-rata 86% namun mempunyai selisih negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Medan belum mampu memenuhi target pendapatan dengan baik, Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kota Medan untuk tahun anggaran 2018 – 2023 mengalami fluktuatif. Meskipun begitu pertumbuhan pendapatan pada tahun 2022 dan 2023 meningkat dengan signifikan, Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi Meski mengalami naik turun, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kota Medan memiliki rata-rata sebesar 38% yang artinya kemampuan daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan terbilang baik, Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD kemampuan daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Berdasarkan hasil analisis kinerja belanja daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2018 - 2023: kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis varian belanja secara keseluruhan selama 6 tahun Kota Medan memiliki rata – rata sebesar 78% yang artinya kinerja Pemerintah Kota Medan dinilai baik, Kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis keserasian belanja dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata – rata sebesar 81,5% yang artinya kinerja belanja operasi dapat dikategorikan sangat serasi, Kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis keserasian belanja dari keseluruhan belanja modal terhadap total belanja memiliki rata – rata sebesar 20,3% yang artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi, Kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja daerah bahwa keseluruhan rata – rata belanja daerah dapat dikatakan efisien dengan nilai sebesar 78,1% yang artinya kinerja Pemerintah Kota Medan telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Referensi

Amanda, Jouzar, K. A., & Ishak, F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.

- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1).
- Assidi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11.
- Hantono. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. CV Media Sains Indonesia.
- Hidayat, M. (2018). Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Pt. Bosowa Propertindo. 2(1), 92–112.
- Kemala, P., Lubis, D., Handayani, L., Hidayah, N. F., & Kemaal, P. K. P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 1–7.
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1).
- Mustafa, S., & Anugranita, D. A. (2016). Analisis Varians Anggaran Pendapatan dan Biaya (Studi pada Pd. Pasar Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 80–92.
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395–406.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, S., Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyuroh, A., & Satriawan, D. G. (2021). *Kinerja Karyawan*.
- Siregar, C. M., & Harahap, L. H. (2022). Analisis APBD Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2015-2021. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 3(2), 659–669.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tani, S. A. I., Amaliah, T. H., & Usman, U. (2023). Analisis APBD dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 179–192.
- Yuliana, Y., Arliansyah, A., Murhaban, M., & Zulkifli, Z. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3).